

KONFLIK INSENTIF DAN MODEL KINERJA DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN FOOD LOSS AND WASTE

Oleh

Tardi Setiabudi¹, Wahyu², Tino Supriantino³

^{1,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

²Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Email: ¹tardybudy@gmail.com, ²bilalwahyu862@gmail.com,

³tino.supriantino@gmail.com

Article History:

Received: 02-02-2025

Revised: 08-02-2025

Accepted: 05-03-2025

Keywords:

Food Loss and Waste,
Incentive Conflict,
Principal-Agent,
Policy
Implementation,
Information System

Abstract: The implementation of Food Loss and Waste (FLW) reduction policies in Indonesia faces challenges due to incentive conflicts between the central government and local governments. Differences in objectives, information asymmetry, and weaknesses in oversight mechanisms lead to opportunistic behavior at the implementation level. This research uses a literature review approach with descriptive qualitative content analysis to synthesize literature related to agency theory and the Van Meter & Van Horn implementation model. Secondary data were obtained through purposive sampling from various relevant journals, books, and policy documents. The research findings identified a data gap of 18% between field information and official reports, indicating constraints in information system integration. Additionally, differences in resource capacity, inter-organizational communication mechanisms, and the characteristics of implementing organizations further exacerbate incentive conflicts. The synthesis of the literature shows that the implementation of a performance-based incentive model, which includes indicators of resource availability, communication effectiveness, and organizational structure, can align national goals with regional operational realities. In conclusion, enhancing digital integration, standardizing data reporting, and strengthening inter-agency coordination are strategic steps to optimize the implementation of FLW policies. Research recommendations include the development of an integrated digital platform and the reformulation of incentive models to enhance accountability, transparency, and the effectiveness of FLW management policies.

PENDAHULUAN

Dalam pengurangan sampah makanan, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis untuk mengatasi permasalahan agensi yang muncul akibat ketidaksesuaian insentif antara agen (pelaku dalam birokrasi dan organisasi lokal) dengan tujuan publik yang lebih luas. Permasalahan agensi dalam hal ini melibatkan perbedaan kepentingan

antara pejabat daerah yang menjalankan kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan, sehingga diperlukan strategi tata kelola yang efektif untuk menyelaraskan tujuan dan menciptakan akuntabilitas (Garske et al., 2020; Lusk & Ellison, 2020).

Pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan karakteristik dan dinamika masyarakat lokal yang memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi kebijakan berdasarkan kebutuhan spesifik wilayahnya (Barbour et al., 2021). Dengan memanfaatkan pendekatan multi-stakeholder, seperti pengembangan *Food Policy Councils* yang melibatkan komunitas, organisasi non-pemerintah (CSO), dan sektor swasta, pemerintah daerah dapat mengurangi momen-momen permasalahan agensi melalui koordinasi yang lebih intensif (Nadeau & Koebele, 2023; Schiff, 2008). Lebih dari itu, pengembangan alat penilaian kebijakan seperti *Local Food-EPI+* memberikan mekanisme evaluasi yang terintegrasi, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau dan memperbaiki implementasi program pengurangan sampah makanan secara berkesinambungan (Ruffini et al., 2024).

Permasalahan agensi ini muncul ketika terdapat misalignment antara tujuan dan insentif yang dimiliki oleh pemerintah yang berfokus pada kepentingan publik, standar regulasi, dan akuntabilitas politis dengan sektor swasta yang cenderung mengutamakan efisiensi operasional dan keuntungan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gesekan pada mekanisme kolaborasi, di mana kurangnya sinkronisasi target dan metode evaluasi kinerja mengakibatkan sulitnya mencapai sinergi optimal dalam pelaksanaan proyek bersama (Callens & Verhoest, 2024).

Konteks inisiatif pengelolaan sampah, misalnya, sektor swasta mungkin memiliki insentif untuk mengoptimalkan keuntungan melalui efisiensi biaya dan inovasi teknologi, sementara pemerintah menitikberatkan pada standar lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menimbulkan konflik tujuan yang mendasari *agency problem*, sehingga memerlukan pengaturan yang cermat tentang pembagian peran, mekanisme monitoring, dan penetapan indikator kinerja yang transparan (Pradana et al., 2020). Pengalaman di Malaysia menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka kolaborasi yang diselaraskan dengan baik, perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab dan target kinerja dapat memperburuk inkonsistensi implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas upaya pengurangan sampah (Pradana et al., 2020; Yeboah-Assiamah et al., 2017).

(Rosyadi et al., 2021) mendokumentasikan bahwa budaya birokrasi di tingkat daerah cenderung berfokus pada agenda internal dan kepentingan masing-masing, yang mengakibatkan kurangnya sinergi antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan. Ketidakmampuan untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan realitas operasional di daerah menunjukkan adanya gap kapasitas yang kuat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menekankan bahwa keputusan publik di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh intuisi dan kepentingan politik daripada analisis data yang komprehensif (Sayogo et al., 2023). Kondisi tersebut menghambat munculnya inovasi dan respon yang adaptif terhadap dinamika lapangan, sehingga kebijakan seperti Perpres No. 97/2017 sulit mencapai sasaran yang diinginkan.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah makanan selama ini banyak terfokus pada sampah rumah tangga, sementara aspek rantai pasok awal, yaitu proses produksi, pengolahan, dan distribusi di tahap hulu, masih kurang mendapat perhatian mendalam.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi pengurangan sampah makanan cenderung menitikberatkan intervensi pada perilaku konsumen dan pengelolaan limbah di tingkat rumah tangga (Chen & Chen, 2018; Falasconi et al., 2019). Namun, temuan dari (Sánchez-Teba et al., 2021) menggarisbawahi pentingnya mengalihkan perhatian kepada rantai pasok awal, di mana terjadi kerugian makanan (food loss) sejak tahap produksi dan pengolahan. Penelitian tersebut menekankan bahwa intervensi di level produksi seperti perbaikan sistem pasca-panen dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi strategi vital untuk meminimalkan kerugian makanan sejak awal rantai pasok.

Data *Food Loss and Waste (FLW)* di tingkat petani menunjukkan ketidakterpaduan yang signifikan dengan sistem pelaporan resmi daerah, di mana terdapat perbedaan antara data yang dikumpulkan langsung di lapangan dan laporan administrasi yang disusun secara resmi. Kesenjangan data ini mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme pengumpulan, verifikasi, dan integrasi informasi antara level operasional pertanian dan sistem pelaporan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan metodologi pengukuran, standar pelaporan yang tidak seragam, dan keterbatasan infrastruktur digital di tingkat pertanian, yang pada gilirannya menghambat akurasi dan efektivitas pembuatan kebijakan berdasarkan data (Xue et al., 2017).

Integrasi *agency theory* dengan model implementasi Van Meter & Van Horn menawarkan pendekatan komprehensif untuk menganalisis konflik insentif dalam pelaksanaan kebijakan publik. *Agency theory*, yang menekankan permasalahan *principal-agent*, menguraikan bagaimana perbedaan tujuan dan insentif antara pembuat kebijakan (*principal*) dan pelaksana (*agent*) dapat menimbulkan asimetri informasi serta perilaku oportunistik. Di sisi lain, model implementasi Van Meter & Van Horn menyediakan kerangka analisis yang sistematis melalui enam indikator kunci, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Elwan et al., 2023). Integrasi kedua teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan secara garis besar, tetapi juga mengidentifikasi titik-titik kritis di mana konflik insentif muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan realitas operasional di lapangan.

Pendekatan integratif ini membantu dalam mengungkap bahwa konflik insentif seringkali terjadi pada dimensi komunikasi dan sikap pelaksana. Apabila mekanisme komunikasi antar organisasi tidak memadai, informasi penting mengenai standar kebijakan dan tujuan strategis tidak tersampaikan secara efektif kepada para agen, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan berdasarkan insentif pribadi atau kepentingan unitnya masing-masing, bukan berdasarkan kepentingan publik (*principal*) (Pasinringi et al., 2020). Selanjutnya, kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan perbedaan karakteristik organisasi juga dapat memperburuk konflik ini. Agen yang memiliki akses sumber daya terbatas cenderung melakukan penyesuaian terhadap sasaran kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan internal mereka, yang pada akhirnya dapat menyimpang dari kebijakan utama yang diharapkan oleh *principal* (Elwan et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan *principal-agent* dalam implementasi kebijakan pengurangan *Food Loss and Waste (FLW)* serta merumuskan model insentif berbasis kinerja yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah. Penggunaan teori agensi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan tujuan

antara *principal*, yang dalam konteks ini dapat merupakan pemerintah pusat atau pemangku kepentingan utama kebijakan FLW, dengan agen berupa aparat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut

LANDASAN TEORI

1. *Agency Theory* dalam Kebijakan Publik

Dalam kajian konflik insentif antara *principal* (pemerintah pusat) dan *agent* (pemerintah daerah) dalam implementasi kebijakan publik, teori agensi memberikan kerangka konseptual yang mendalam dalam menguraikan perbedaan tujuan, risiko perilaku oportunistik, serta asimetri informasi antara kedua pihak. Eisenhardt (1989) telah menyoroti bahwa konflik insentif muncul ketika terdapat perbedaan mendasar dalam insentif dan tujuan antara *principal* dan *agent*, sehingga agen cenderung mengambil tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh *principal* (Amit, 2019).

Dalam konteks interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat sebagai *principal* memiliki mandat untuk menetapkan kebijakan nasional yang menyentuh berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai *agent* di lapangan seringkali menghadapi berbagai tekanan kontekstual, seperti dinamika politik lokal dan pertimbangan pragmatis terkait kondisi daerah yang dapat mengarah pada penyimpangan perilaku yang tidak selaras dengan target kebijakan nasional. Oleh karena itu, konflik insentif ini muncul ketika agen cenderung mengoptimalkan kinerja yang menguntungkan secara lokal dengan mengorbankan pencapaian sasaran nasional, terutama jika struktur insentif dan mekanisme pengawasan tidak dirancang secara efektif (Amit, 2019).

Kasus penyalahgunaan anggaran untuk program pengurangan *Food Loss and Waste (FLW)* dapat dianalisis melalui analogi dengan temuan pada penyalahgunaan anggaran di sektor pemerintah daerah. Meskipun secara spesifik belum banyak didokumentasikan mengenai penyalahgunaan anggaran FLW, mekanisme dan risiko yang mendasarinya memiliki kemiripan dengan kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa dan APBD. Misalnya, (Maulana, 2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran di tingkat desa sering kali disertai risiko korupsi, di mana penyalahgunaan dana terjadi sepanjang setiap tahapan pengelolaan, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Praktik semacam ini, apabila terjadi pada anggaran FLW, menunjukkan bahwa alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk mengurangi limbah pangan dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan pengurangan FLW.

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn

Dalam kerangka Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn, terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tiga di antaranya adalah sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik organisasi pelaksana. Variabel-variabel tersebut saling terkait dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat direalisasikan secara efektif di lapangan.

a. Sumber Daya

Sumber daya mencakup semua aspek yang mendukung pelaksanaan kebijakan, antara lain dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Menurut Van Meter & Van Horn, ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor fundamental untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat implementasi dengan berdampak pada ketidakmampuan mengoperasionalkan program, mengurangi kualitas pelayanan, serta menurunnya efektivitas monitoring dan evaluasi (Elwan et al., 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap ketersediaan sumber daya perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa masing-masing unit pelaksana memiliki akses yang memadai terhadap dukungan finansial, material, dan SDM. Selain itu, upaya pengadaan dan distribusi sumber daya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya tersentralisasi, melainkan juga responsif terhadap kebutuhan lokal (Adani et al., 2023).

b. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan elemen kunci yang mendasari koordinasi antar lembaga dan tingkat pemerintahan. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi antar organisasi memainkan peran vital untuk mentransfer informasi, menyamakan persepsi, serta menyukseskan kolaborasi lintas sektoral. Model Van Meter & Van Horn menekankan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi yang jelas, tetapi juga dengan mekanisme umpan balik yang memungkinkan penyesuaian strategi secara real-time. Keterbatasan pada mekanisme komunikasi sering kali menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara pusat dan daerah, yang pada gilirannya dapat mengganggu sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan (Elwan et al., 2023). Oleh karena itu, sistem komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting untuk mencapai koherensi antara standar kebijakan yang ditetapkan dan operasionalisasi di lapangan (Adani et al., 2023).

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur internal, budaya organisasi, kapabilitas manajerial, serta kepemimpinan yang ada dalam setiap unit pelaksana kebijakan. Variabel ini sangat menentukan bagaimana kebijakan diinterpretasikan dan diimplementasikan di tingkat operasional. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas dan budaya kerja yang mendukung inovasi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu mengatasi hambatan yang timbul selama proses implementasi. Sebaliknya, kelemahan dalam kepemimpinan atau ketidakjelasan struktur organisasi dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan, sehingga menghambat pencapaian sasaran kebijakan (Fiqih et al., 2022). Karakteristik organisasi juga mencakup kompetensi teknis dan manajerial yang dimiliki oleh para pelaksana, yang harus terus dikembangkan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas agar sejalan dengan dinamika dan tuntutan lingkungan operasional yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi antar organisasi, dan kekuatan karakteristik organisasi pelaksana itu sendiri. Upaya peningkatan ketiga variabel tersebut secara simultan akan berkontribusi pada terwujudnya pelaksanaan

kebijakan yang lebih terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap dinamika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kajian pustaka secara kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan mengenai teori hubungan principal-agent, model implementasi kebijakan (misalnya, Van Meter & Van Horn), serta penerapan insentif berbasis kinerja dalam kebijakan pengurangan Food Loss and Waste (FLW). Seperti yang dilakukan oleh (Hajar et al., 2024) dalam studi tentang implementasi kebijakan di sektor pendidikan, penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif dari fenomena yang kompleks melalui identifikasi, klasifikasi, sintesis, dan interpretasi data literatur.

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur (*literature review*) dengan desain kualitatif deskriptif. Pendekatan ini konsisten dengan metode yang digunakan oleh (Iriany et al., 2020) yang mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan melalui analisis isi literatur, dokumen, dan laporan resmi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemetaan konsep-konsep kunci, seperti dinamika konflik insentif antara principal (pemerintah pusat) dan agent (pemerintah daerah) serta penerapan model insentif berbasis kinerja, yang relevan dengan konteks pengurangan FLW.

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur akademik termasuk artikel jurnal, buku, disertasi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik implementasi kebijakan, teori agensi, dan model Van Meter & Van Horn. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sumber-sumber literatur yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik kajian. Pemilihan sumber ini selaras dengan pendekatan yang dikemukakan oleh (Elwan et al., 2023) yang menekankan pentingnya penggunaan sumber-sumber literatur yang telah teruji kredibilitas dan aplikasinya dalam pengembangan model implementasi kebijakan.

3. Metode Penyajian dan Analisis Data

Data sekunder yang terkumpul akan disajikan secara naratif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dimulai dengan identifikasi dan pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema utama, seperti konflik insentif antara principal dan agent, peran sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola, kekhasan, dan kesenjangan konseptual yang ada. Pendekatan ini serupa dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu (Elwan et al., 2023; Hajar et al., 2024; Iriany et al., 2020), yang membuktikan efektivitasnya dalam merumuskan kerangka pemikiran dari fenomena implementasi kebijakan yang kompleks.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan merupakan pedoman analisis literatur yang mencakup:

- a. Daftar kriteria inklusi dan eksklusi sumber-sumber literatur, untuk memastikan hanya literatur yang relevan dan kredibel yang dipilih.
- b. Kerangka taksonomi untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema kunci, seperti konflik insentif, teori principal-agent, dan indikator model implementasi Van Meter & Van Horn.
- c. Templat untuk pencatatan data bibliografis dan ringkasan temuan, guna memudahkan proses perbandingan serta sintesis di antara sumber-sumber yang telah dikumpulkan.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika hubungan principal-agent serta kerangka perumusan model insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan FLW. Metode kajian pustaka yang sistematis dan terstruktur ini telah terbukti efektif dalam beberapa studi, sehingga dapat menghasilkan analisis mendalam dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang disusun berdasarkan pendekatan kajian pustaka dan analisis konten secara kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui sintesis literatur dari berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian ini telah dikonstruksi secara induktif dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari studi terdahulu, sehingga menghasilkan hipotesis awal dan konsep model yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Dinamika Konflik Insentif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Analisis literatur mengungkapkan bahwa konflik insentif antara principal (pemerintah pusat) dan agent (pemerintah daerah) muncul akibat perbedaan tujuan, asimetri informasi, dan mekanisme kontrol yang belum optimal. Berdasarkan sintesis temuan, teridentifikasi bahwa pemerintah pusat menetapkan target dan standar nasional yang komprehensif dalam pengurangan *Food Loss and Waste (FLW)*, sedangkan implementasi di tingkat daerah sering kali mengalami distorsi karena adanya penyesuaian lokal untuk mengakomodasi kondisi politik dan sumber daya daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan kepentingan dan minimnya mekanisme evaluasi berbasis kinerja merupakan faktor yang mendasari konflik tersebut.
2. Kesenjangan Data antara Lapangan dan Laporan Resmi
Dari hasil analisis terhadap literatur yang ada, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara *Food Loss and Waste* yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data yang dilaporkan melalui sistem resmi pemerintah daerah. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya masalah integrasi sistem informasi dan standarisasi pengukuran, yang pada gilirannya mengurangi akurasi evaluasi efektivitas kebijakan FLW. Peneliti menafsirkan bahwa perbedaan ini menghambat proses perumusan intervensi yang tepat sasaran karena kebijakan yang dirancang tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi. Hal ini mendorong perlunya pengembangan platform digital terpadu yang dapat mengurangi asimetri data dan meningkatkan transparansi pelaporan.
3. Perumusan Model Insentif Berbasis Kinerja

Hasil sintesis literatur mengemukakan bahwa untuk menyelaraskan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah, perlu dikembangkan model insentif berbasis kinerja. Model yang dihasilkan mengacu pada kerangka implementasi Van Meter & Van Horn yang memfokuskan pada indikator sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik organisasi pelaksana. Dari analisis ini, diperoleh bahwa:

- a. Indikator ketersediaan sumber daya harus mencakup alokasi anggaran yang memadai serta dukungan SDM dan infrastruktur pendukung;
- b. Efektivitas komunikasi antar organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi target kebijakan dan umpan balik operasional tersampaikan dengan jelas;
- c. Karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur organisasi dan budaya kerja, harus mendukung adaptasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Model insentif yang diusulkan menekankan pemberian penghargaan, baik finansial maupun non-finansial, apabila pemerintah daerah berhasil mencapai target kinerja yang berdasarkan indikator-indikator tersebut. Pendekatan ini berdasar pada prinsip bahwa insentif yang tepat dapat mengurangi kecenderungan perilaku oportunistik dan meningkatkan akuntabilitas implementasi kebijakan FLW.

4. Implikasi Temuan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan adanya kebutuhan mendesak untuk:

- a. Mengintegrasikan sistem pelaporan data FLW agar informasi yang dikumpulkan di lapangan dapat secara akurat ditransmisikan ke tingkat pelaporan resmi;
- b. Mengembangkan model insentif berbasis kinerja yang dirancang khusus untuk konteks operasional pemerintah daerah, sehingga dapat menyelaraskan antara target nasional dan realitas lokal;
- c. Memperkuat mekanisme komunikasi antar organisasi dan meningkatkan kapasitas manajerial serta teknis pada lembaga pelaksana. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan konflik insentif dan menghasilkan peningkatan efektivitas kebijakan FLW, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan sistem pangan nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa permasalahan konflik insentif serta kesenjangan data memerlukan pendekatan analitis yang holistik dengan basis temuan literatur. Metode kajian pustaka dan analisis konten yang dilakukan secara induktif berhasil menghasilkan model konseptual yang dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konflik insentif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengurangan *Food Loss and Waste* muncul akibat perbedaan tujuan, asimetri informasi, dan kendala integrasi data antara lapangan dengan laporan resmi. Kondisi ini menyebabkan evaluasi efektivitas kebijakan menjadi tidak akurat dan meningkatkan kecenderungan perilaku oportunistik di tingkat daerah, sehingga menyulitkan sinkronisasi target nasional dengan realitas operasional lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar mengembangkan model insentif berbasis kinerja yang mengintegrasikan indikator ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi antar organisasi, dan karakteristik organisasi pelaksana. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sistem informasi digital terpadu serta peningkatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi kebijakan pengurangan *Food Loss and Waste* berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adani, P. S., Asropi, A., & Widjayanti, A. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 237–253. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.237-253.2023>
- [2] Amit, A. (2019). Value From Control: Subjective Valuations of Negotiations by Principals and Agents. *Negotiation and Conflict Management Research*, 13(4), 326–342. <https://doi.org/10.1111/ncmr.12171>
- [3] Barbour, L., Lindberg, R., Woods, J., Charlton, K., & Brimblecombe, J. (2021). Local Urban Government Policies to Facilitate Healthy and Environmentally Sustainable Diet-Related Practices: A Scoping Review. *Public Health Nutrition*, 1–17. <https://doi.org/10.1017/s1368980021004432>
- [4] Callens, C., & Verhoest, K. (2024). *Conditions for Successful Public-Private Collaboration for Public Service Innovation*. 52–79. <https://doi.org/10.4337/9781803923895.00012>
- [5] Chen, C., & Chen, R. J. C. (2018). Using Two Government Food Waste Recognition Programs to Understand Current Reducing Food Loss and Waste Activities in the U.S. *Sustainability*, 10(8), 2760. <https://doi.org/10.3390/su10082760>
- [6] Elwan, L. O. M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- [7] Falasconi, L., Cicatiello, C., Franco, S., Segré, A., Setti, M., & Vittuari, M. (2019). Such a Shame! A Study on Self-Perception of Household Food Waste. *Sustainability*, 11(1), 270. <https://doi.org/10.3390/su11010270>
- [8] Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097>
- [9] Garske, B., Heyl, K., Ekardt, F., Weber, L., & Gradzka, W. (2020). Challenges of Food Waste Governance: An Assessment of European Legislation on Food Waste and Recommendations for Improvement by Economic Instruments. *Land*, 9(7), 231. <https://doi.org/10.3390/land9070231>
- [10] Hajar, Q., Nursidrati, N., Firmasyah, E., Baharudin, B., & Awaluddin, R. (2024). Pemerataan Pendidikan Melalui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah SMAN 1 Hu'u Dan SMK Negeri 1 Hu'u Kabupaten Dompu. *Jurnal Pendidikan Dan*

- Pembelajaran Indonesia (Jppi)*, 4(1), 119–126. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.443>
- [11] Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 15–20. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i2.75>
- [12] Lusk, J. L., & Ellison, B. (2020). Economics of Household Food Waste. *Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne D Agroéconomie*, 68(4), 379–386. <https://doi.org/10.1111/cjag.12256>
- [13] Maulana, M. I. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214–231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- [14] Nadeau, N., & Koebele, E. A. (2023). Collaborating to Reduce Food Waste: Building Collaborative Advantage in Local Food Systems. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 38. <https://doi.org/10.1017/s1742170523000285>
- [15] Pasinringi, A., Samad, M. A., Alamsyah, M. N., & Jeni. (2020). Public Health Policy in Donggala Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 11, 1–12. <https://doi.org/10.47577/tssj.v11i1.1509>
- [16] Pradana, A. E., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2020). Public-Private Partnership in the Framework of Waste Management Into Electrical Energy in Jatibarang Landfill, Semarang City. *Journal of Local Government Issues*, 3(2), 130–144. <https://doi.org/10.22219/logos.v3i2.11809>
- [17] Rosyadi, S., Kusuma, A. S., Fitrah, E., Zayzda, N. A., & Pimoljinda, T. (2021). Barriers of Public Policy Faced by SMEs of Creative Economy in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 64(1), 32–48. <https://doi.org/10.1108/ijlma-02-2020-0061>
- [18] Ruffini, O., Relf, C., Mann, D., Blake, M. R., Carrad, A., Reeve, B., Barbour, L., Vanderlee, L., Vandevijvere, S., & Sacks, G. (2024). Development of the Local Food Systems Policy Index (Local Food-Epi+) Tool and Assessment Process to Benchmark the Implementation of Local Government Policies for Creating Healthy, Equitable and Environmentally Sustainable Food Systems. *Public Health Nutrition*, 27(1). <https://doi.org/10.1017/s136898002400140x>
- [19] Sánchez-Teba, E. M., Gémar, G., & Soler, I. P. (2021). From Quantifying to Managing Food Loss in the Agri-Food Industry Supply Chain. *Foods*, 10(9), 2163. <https://doi.org/10.3390/foods10092163>
- [20] Sayogo, D. S., Yuli, S. B. C., & Amalia, F. A. (2023). Data-Driven Decision-Making Challenges of Local Government in Indonesia. *Transforming Government People Process and Policy*, 18(1), 145–156. <https://doi.org/10.1108/tg-05-2023-0058>
- [21] Schiff, R. (2008). The Role of Food Policy Councils in Developing Sustainable Food Systems. *Journal of Hunger & Environmental Nutrition*, 3(2–3), 206–228. <https://doi.org/10.1080/19320240802244017>
- [22] Xue, L., Liu, G., Parfitt, J., Liu, X., Herpen, E. v., Stenmarck, Å., O'Connor, C., Östergren, K., & Cheng, S. (2017). Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data. *Environmental Science & Technology*, 51(12), 6618–6633. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b00401>
- [23] Yeboah-Assiamah, E., Asamoah, K., & Kyeremeh, T. A. (2017). Decades of Public-Private Partnership in Solid Waste Management. *Management of Environmental Quality an International Journal*, 28(1), 78–93. <https://doi.org/10.1108/meq-05-2015-0098>